

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang terkandung dalam UU No 6 tahun 2014, desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara demografis dan geografis. Dengan diberlakukannya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa ini, maka Pemerintah desa dapat membantu pembangunan nasional yang merupakan proses pengembangan seluruh sistem penyelenggaraan Negara dalam upaya meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan sosial, desa adalah sarana utama Pemerintah untuk menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan. Pada prinsipnya pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan desa dalam enjadikan gerakan usaha ekonomi desa (Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permedesa PDTT No. 4/2015 tentang pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, dalam peraturan perundang-undangan tentang desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap praksarsa desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Dalam asas sistem hukum, prakarsa tersebut memerlukan legitimasi yuridis dalam bentuk Perbup/Walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala desa. Di dalam peraturan bupati tersebut dicantumkan rumusan pasal (secara normatif) tentang : a) pendirian dan pengelolaan BUMdes ke dalam ketentuan tentang kewenangan lokal berskala desa

bidang pengembangan ekonomi lokal desa, b) penetapan BUMDes ke dalam ketentuan tentang kewenangan lokal berskala desa di bidang Pemerintahan Desa.

Keberadaan BUMdes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa, khususnya di desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) No. 39 Tahun 2010 bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan dengan diharuskan mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Seperti yang dijelaskan di peraturan undang-undang tersebut bahwa suatu desa harus memiliki BUMdes guna untuk mengatasi ketimpangan sosial dilihat dari berbagai aspek.

Perda Bantul No.3 Tahun 2016 tentang BUMDes menjelaskan bahwa untuk menciptakan perubahan pada suatu Desa Pemerintah memberikan keleluasaan dan mandiri kepada Pemerintah Desa dalam mengambil keputusan untuk merubah ekonomi desa tersebut. Tak hanya melindunginya dengan Undang-undang Pemerintah bahkan memberikan modal bagi setiap desa untuk mengembangkan potensi desa dalam berbagai hal. BUMdes bukan hanya menyusun struktur manajemen dan memindai potensi lokal melainkan keberanian untuk memulai, karena BUMDes merupakan kebijakan Pemerintah yang memposisikan desa sebagai subyek dan melindungi otonomi membuat keputusan dengan UU. Upaya pengembangan ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah

melalui berbagai program. Terdapat banyak factor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut.

Dalam Undang-undang terbaru No. 6 Tahun 2014 tentang desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dari UU No. 6 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan dorongan dari Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Di dalam Pasal 5 Ayat 1 Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa pendirian BUMDes harus disepakati melalui musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 25, menjelaskan tentang strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDes, BUMDes merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai upaya peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Zulkarnaen, 2016). Pengelolaan BUMDes ini sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa. Pengembangan basis ekonomi

di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Kecamatan Sewon terdapat beberapa desa yang memiliki BUMdes yang aktif dan produktif, salah satunya ada di Desa Panggungharjo. Di Desa Panggungharjo mempunyai BUMDes yang memiliki omset cukup besar dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Di tahun 2017 BUMDes Panggungharjo mempunyai omset 500 juta.

Dengan omset sebesar itu BUMDes Panggungharjo meraih penghargaan dalam ajang bergengsi Indonesia Property & Bank Award XII pada Kamis, 9 November 2017. Indonesia Property & Bank Award adalah sebuah ajang penghargaan yang diadakan setiap tahun oleh majalah Property & Bank untuk para pelaku usaha di bidang properti dan perbankan nasional. Adanya peran BUMDes di sebuah desa guna mengurangi angka kemiskinan di Desa itu sendiri. Ada beberapa program yang sukses dalam mengatasi kemiskinan salah satunya program KUPAS, program ini dapat mengurangi kemiskinan karena sebagian besar masyarakat ikut andil dalam mengelola program yang dibuat oleh BUMDes Panggungharjo. Dengan pendapatan omset yang cukup besar kemiskinan di desa tersebut ikut naik

Pada Tahun 2014 ada sekitar 12 BUMDes yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bantul. Hingga Tahun 2016 sudah sekitar 25 BUMDes aktif dan produktif yang ada di Kabupaten Bantul (www.bantulkab.go.id). Desa Panggungharjo adalah salah satu desa di Kabupaten Bantul yang wilayahnya tidak didukung oleh potensi alam yang bisa dikembangkan. Oleh sebab itu awal didirikannya BUMDes di Desa Panggungharjo yang diberi nama BUMDes Panggung Lestari pada Tahun 2013 hanya memiliki unit usaha Pengelolaan Sampah.

BUMDes Panggung Lestari berhasil mengelola unit usaha Pengelolaan Sampah melalui Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) dengan modal awal Rp 25.000.000 dan jumlah aset per bulan Mei 2014 mencapai Rp 123.000.000. Pencapaian ini menjadi hal yang cukup membanggakan untuk BUMDes Panggung Lestari karena berhasil meraih penghargaan BUMDes terbaik nasional versi

KEMENDES pada Tahun 2014. Disamping banyaknya prestasi yang di raih oleh Desa Panggunharjo terutama BUMDes Panggun Lestari, masih terdapat beberapa kendala atau dampak dari BUMDes dalam mengatasi ketimpangan sosial seperti kemiskinan. Mengatasi permasalahan kemiskinan merupakan bagian dari tugas an fungsi Pemerintahan Desa dengan adanya dana desa yang telah disediakan. Dengan mengentas permasalahan kemiskinan maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat(Aneta, 2010). di Indonesia sudah menjadi persoalan utama bagi bangsa.

Pada hasil Survei Sosial Ekonomi yang di lakukan Badan Pusat Statistika (BPS) penduduk miskin di perkotaan di Indonesia tahun 2016 pada bulan maret sebesar 7,79% di bandingkan dengan bulan september 7,73%. Sedangkan di tahun 2017 penduduk miskin di perkotaan di Indonesia pada bulan maret sebesar 7,72%, di bandingkan dengan bulan september sebesar 7,26%. Di lihat dari data di atas jumlah penduduk miskin di perkotaan di Indonesia pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan persentasi jumlah penduduk miskin. Penanggulangan kemiskinan ini juga merupakan kebijakan dan program Pemerintah pusat yang diinstruksikan kepada Pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis untu meningkatkan angka kesejahteraan rakyat. Berikut data kemiskinan Desa Panggunharjo Tahun 2017-2018 di lihat dari PKH per (KK) dan Non PKH per (KK).

Tabel 1. 1 Data Penduduk Miskin Desa Panggungharjo 2017-2018

Tahun	BPNT/RASTRA			Dana Desa
	NON PKH (KK)	PKH (KK)	NON PKH & PKH (KK)	
2017	2573	1182	3755	4,925,999,960
2018	2631	1544	4175	5,155,633,760

Sumber : Pemerintahan Desa Panggungharjo 2019

Desa Panggungharjo yang memiliki jumlah kemiskinan di Kecamatan Sewon dan kemiskinan yang paling banyak di Desa Panggungharjo dengan melihat dari jumlah PKH yang dikeluarkan oleh Pemerintah desa sebesar 1544 KK(Kartu Keluarga) di Tahun 2018. Desa Panggungharjo mengalami kenaikan dalam jumlah kemiskinan sebanyak 4175 jiwa dan berdasarkan dengan data Pemerintah Desa Panggungharjo 2019, Desa Panggungharjo memiliki penduduk miskin paling banyak di kecamatan sewon pada tahun 2018.

Tetapi dengan adanya informasi kemiskinan yang ada di Desa Panggungharjo ini, dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa Panggungharjo ini, mendapatkan penghargaan The 4th ASEAN Rural Development and Poverty Eradication Leadership Award di Nay Pyi Taw, Myanmar pada bulan November 2019. BUMDes Panggung Lestari, dari Desa Panggungharjo, Bantul ini dinilai layak atas ASEAN Leadership Award karena aksi nyatanya melalui Rumah Pengelolaan Sampah (RPS). Pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo didasarkan pada dua perspektif, yaitu perspektif kesehatan lingkungan sekaligus perspektif bisnis (usaha), oleh karena itu pengelolaan sampah ini dilakukan oleh BUMDes. Tetapi pada tahun 2018, terjadi kesenjangan bahwa berdasarkan dengan BPNT/ RASTRA Kecamatan sewon 2018, menunjukkan bahwa Desa Panggungharjo menduduki posisi pertama dengan jumlah kemiskinan terbanyak di

desa sewon. Hal ini dilihat berdasarkan jumlah bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dalam jumlah Kepala Keluarga) di Desa Panggungharjo yang memiliki jumlah kemiskinan di Kecamatan Sewon dan kemiskinan yang paling banyak di Desa Panggungharjo dengan melihat dari jumlah PKH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sebesar 1544 KK(Kartu Keluarga) Berdasarkan dengan hal tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana efektifitas program BUMDes dalam mengatasi ketimpangan sosial masyarakat Panggungharjo

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai strategi BUMDes dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Panggungharjo pada tahun 2017-2018 maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimaimana efektifitas program Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Panggungharjo?
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap keberhasilan BUMdes Panggung Lestari?

1.3. Tujuan

1. Mengetahui efektifitas dari program BUMDes dalam menanggulangi kemiskinan yang berada di Desa Panggungharjo.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas program Bumdes Panggung Lestari di Desa Panggungharjo.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan tambahan wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat meningkatkan pengetahuan penulis dalam aplikasi dan teori.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Sebagai acuan bagi Pemerintah Desa tentang keberhasilan BUMDes dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Panggungharjo
2. Mengetahui apakah berhasil strategi BUMDes dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Panggungharjo

1.5. Literature Review

Dalam penelitian ini mengambil studi terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu atas pengumpulan literatur dan studi pustaka lainnya. berguna untuk membandingkan penelitian satu dengan penelitian yang lain.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	(Putu et al., 2016)	Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tanjung dan Depeha,.	Bahwa dari penerapan Ipteks adalah pengelolaan administrasi usaha yang berbasis IT dengan hasil program akuntansi (<i>software</i>) yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra, Meningkatkan kemampuan mitra tentang administrasi usaha sesuai standar akuntansi, sehingga dengan software mampu menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan cermat, Mitra mampu mengelola usaha dengan baik , memiliki perencanaan usaha yang jelas.

2	(Sri & Dewi, 2014)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perokonomian Desa	Adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa.
3	(Anggraeni, 2016)	Efektivitas Pimpinan, Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi	Untuk mengukur efektivitas suatu program yaitu dengan diukurinya dari kepuasan kerja, produktivitas, efisiensi, kemampuan beradaptasi, pengembangan dari suatu program itu sendiri.
4	(Wilianto Nasila, 2013)	Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu	Efektivitas ini bertujuan untuk membangkitkan motivasi, menciptakan dan meningkatkan hubungan kerja, meningkatkan modal usaha, mendayagunakan potensi social ekonomi local, dan memperkuat budaya kewirausahaan, serta mengembangkan akses pasar.
5	(Ekardo et al., 2014)	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan	Tujuan Efektivitas ini mendeskripsikan efektivitas PKH bagi rumah tangga yang mendapatkan bantuan. Tujuan ini belum efektif karena bantuan ini belum tepat sasaran.
6	(Sudarsana, 2015)	Partisipasi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan.	berdasarkan penelitian yang telah di teliti. Peneliti menjelaskan menggunakan program desa seperti contoh penanggulangan kemiskinan dan kerawanan pangan dengan melibatkan berbagai pihak. Penelitian ini mendeskripsikan perencanaan program tersebut beserta keterlibatan masyarakat di dalamnya termasuk faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat.
7	(Hayyuna et al., 2013)	Manajemen Aset BUMDes Dalam	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa strategi

		Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa	manajemen aset BUMDes adalah dengan mengamati lingkungan, penyusunan strategi, dan evaluasi atau control yang dilakukan dalam bidang produksi barang maupun jasa agar mendorong peningkatan BUMDes.
8	(Asfi & Wijaya, 2015)	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Program Gerdu Kempling Di Kelurahan Kemijen Kota Semarang	Efektivitas ini ditekankan pada kemandirian masyarakatnya dalam membuat atau mengambil keputusan yang telah dibentuk melalui program gerdu kempling.
9	(Zulkarnaen, 2016)	Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta.	Desa parakan Salam memiliki potensi dalam mendirikan BUMDes. Melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada dimasyarakat sekitar saling bersinergi untuk lebih maksimal guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara.
10	(Ridlwan, 2015)	Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa	Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah menjadi pengaturan yang komprehensif tentang desa. Berbeda dari UU Nomor 32 Tahun 2004, pengaturan mengenai BUMDes dalam UU Desa yang baru ini lebih lengkap. BUMDes tetap diposisikan sebagai suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desadan pemerintah desa.

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan penelitian yang sudah di teliti oleh peneliti terdahulu dengan penelitian saya terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu di penelitian dahulu menggunakan peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa yang berdasarkan menurut undang-undang yang telah diterapkan di negara ini. Tujuan Badan Usaha Milik Desa mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa dan mengurangi angka kemiskinan. Dan pada penelitian terdahulu untuk melihat angka kemiskinan pada desa dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Dan sehingga pemerintah menerapkan di berbagai daerah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa agar tujuan tersebut dapat dijalankan dengan baik guna mengatasi kemiskinan di negara terkhususnya di pedesaan. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa membutuhkan partisipasi masyarakat juga guna mengelola aset atau potensi yang ada di Desa tersebut. Undang-Undang Desa yang baru tetap diposisikan sebagai suatu roda penggerak perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan Pemerintah Desa.

Sedangkan penelitian yang saya pakai melihat bagaimana strategi Badan Usaha Milik Desa Panggungharjo dalam mengatasi kemiskinan, melihat dari beberapa aspek strategi yang sudah dikatakan berhasil dalam mengurangi kemiskinan. Dan sebagaimana telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dimana setiap Desa harus mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mengatasi kemiskinan. Pada penelitian ini memfokuskan di Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggungharjo apa sudah berhasil dalam mengatasi kemiskinan di desa tersebut. Sedangkan penelitian sekarang mencari prioritas strategi dalam mengatasi kemiskinan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari kata efektif yaitu terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian efektivitas sering dikaitkan dengan pengertian efisien. Namun, jika efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan pengertian efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan antar *input dan output*.

Efektivitas pada kesimpulannya dikatakan sebagai taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil maupun segi usaha yang diukur dengan mutu, jumlah serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran-ukuran tertentu. Efektivitas berfokus pada hasil (*output*), program, atau kegiatan yang dinilai efektif, apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya.

Dalam penelitian ini, efektivitas yang dilihat dalam penelitian adalah efektivitas program dari Badan Usaha Miliki Desa (BUMdes) yang merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau

kegiatan. Efektivitas program merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Untuk mengukur efektivitas program, ada beberapa indikator (Gibson, 2017), yaitu:

a. Keberhasilan Program

Yaitu keberhasilan program dalam menjalankan visi misi dan tujuan program tersebut. Dalam penelitian ini keberhasilan program yang dilihat adalah keberhasilan program yang telah dibuat oleh BUMdes dalam menanggulangi kemiskinan pada Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Bantul

b. Produktivitas Program

Produktivitas program merupakan merefleksikan hubungan antara input dan output, setiap program memiliki input dan output yang perlu disesuaikan dalam visi-misi dan tujuan program tersebut.

c. Efisiensi

Merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi.

d. Kemampuan beradaptasi

Adalah kemampuan sampai sejauh mana program BUMdes tersebut merespon perubahan internal maupun eksternal. Kemampuan beradaptasi dalam konteks ini merujuk pada kemampuan manajemen untuk merasakan perubahan dalam lingkungan dan perubahan yang ada pada program tersebut.

e. Pengembangan Program

Mengukur kemampuan program organisasi meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi tuntutan lingkungan. Usaha pengembangan ini biasanya dilakukan dengan cara pelatihan pada karyawan.

Pendekatan Terhadap Efektivitas

Pendekatan terhadap efektivitas dilakukan dengan acuan sebagai bagian yang berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan *input* atau masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Menurut Daft efektivitas dapat dievaluasi dengan melihat beberapa hal yaitu : pencapaian sasaran, proses pelaksanaan program yang tercermin dalam perilaku organisasi ketika berinteraksi dengan lingkungan, kepuasan konstituen dalam lingkungan, kesehatan kondisi internal, dan penilaian subyektif seseorang pada organisasi.

a. Pendekatan sasaran goal (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan mengidentifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yaitu dengan mengukur

keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

b. Pendekatan stakeholder

Pendekatan stakeholder menekankan pada kepuasan konstituen dalam suatu lingkungan, yang termasuk dalam konstituen adalah pemasok, pelanggan, pemilik, karyawan, pemegang saham, masyarakat, pemerintah dan lain sebagainya.

c. Pendekatan system (*System Approach*)

Pendekatan ini menekankan pada sasaran jangka panjang dengan mengindahkan interaksi antara organisasi dan lingkungannya. Jadi, penekanannya tidak pada hasil akhir saja.

d. Pendekatan proses internal

e. Pendekatan nilai bersaing

Pendekatan ini menekankan pada nilai subyektif seseorang pada organisasinya. Pendekatan nilai bersaing sering digunakan organisasi dalam mengukur keefektifan organisasi.

1.6.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Definisi Badan Usaha Milik Desa

BUMDes dalam (Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014) merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat

mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan BUMDes dalam (Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014) yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha

kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy)
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Dalam pusat

kajian dinamika sistem pembangunan menyebut terdapat tujuan berdirinya BUMdes. Ada empat tujuan pendirian BUMdes yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan, disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di

masyarakat desa. aktivitas yang harus dilakukan dalam mempersiapkan pendirian BUMDes, meliputi:

1. Mendisain struktur organisasi

BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawab) antar personil atau pengelola BUMDes.

2. Menyusun job deskripsi (gambaran pekerjaan)

Penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes diperlukan agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

3. Menetapkan sistem koordinasi

Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.

4. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga

Kerja sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling

menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes

Agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

6. Menyusun desain sistem informasi

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.

7. Menyusun rencana usaha (business plan)

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

8. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan

Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah

pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

9. Melakukan proses rekrutmen

Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa ke dalam forum rembung desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat.

10. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan

Agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugas- tugasnya, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, pemberian gaji yang berarti pengelola BUMDes menerima sejumlah uang dalam jumlah yang tetap setiap bulannya. Pemberian upah yang didasarkan pada kerja borongan. Sehingga jumlah yang diterima dapat bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran. Pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar

kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian imbalan kepada pengelola BUMDes harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.

Keberadaan BUMDes sebagai Penguatan Ekonomi Desa

BUMDes sebagai lembaga pengembangan potensi desa diperkirakan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. UU No. 6 tahun 2014 tentang payung hukum yang diberikan desa atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara substansial, UU No. 6 tahun 2014 mengerakkan sekaligus mendorong desa untuk pemenuhan pelayanan desa kepada masyarakat dengan subjek pembangunan.

Keberadaan BUMDes menjadi suatu lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif. Mengingat BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang bermodal usaha, yaitu sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa memang sudah berhasil mengatur rumah tangga sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah.

1.6.3. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan ialah persoalan yang memiliki arti multimedisional yaitu persoalan terkait sosio kultur, kondisi ekonomi dan persoalan structural. Menurut badan pusat statistik dalam (Yonowo, 2006) menyatakan bahwa kemiskinan yaitu sebuah kondisi terkait nilai standar kebutuhan minimum berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Dimana garis kemiskinan ialah jumlah pengeluaran yang di perlukan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari hari baik itu berupa sandan, pangan maupun papan. Kemiskinan dapat di artikan bahwa kondisi individu atau seseorang baik itu sekelompok atau individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari. Sedangkan menurut Chamber dalam (Yonowo, 2006) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang di tandai dengan harapan hidup yang rendah, lingkungan yang kumuh, kekurangan gizi, tuna aksara, wabah penyakit, dan mortabilitas bayi yang tinggi. Faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya pendapatan yang rendah, kelemahan fisik, isolasi dan tidak memiliki kekuatan dalam hal tawar menawar atau pun politik.

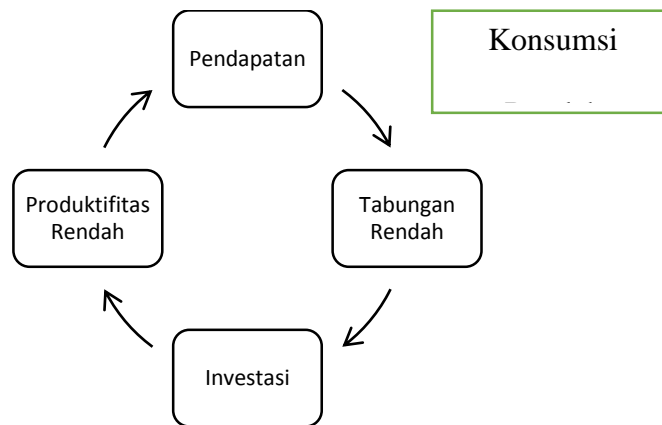
Kemiskinan dapat di jelaskan secara berbeda sesuai dari sudut pandang penglihatannya tentang kemiskinan tersebut. Cara pandang yang berbeda dapat menjelaskan bagaimana sifat, kondisi dan konteks dalam kemiskinan dapat di pahami, sebagaimana sebab kemiskinan di identifikasi, dan bagaimana mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat di bagi menjadi 5 bentuk menurut adit dalam (Alfana, 2014):

1. Kemiskinan Kultural, Kemiskinan ini mengarah terhadap sikap persoalan seseorang atau masyarakat yang di sebabkan oleh factor budaya, maksudnya tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, kehidupan yang bermalasan, pemborosan, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
2. Kemiskinan Struktural, situasi ini di sebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan.
3. Kemiskinan absolut, sesuatu kondisi terkait nilai standar kebutuhan minimum berada di bawah garis kemiskinan yang tidak mampu memenuhi kehidupan sehari hari seperti (sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan).
4. Kemiskinan situasional atau kemiskinan natural, kemiskinan ini terjadi di daerah daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karna itu menjadi miskin.
5. Kemiskinan relative, kemiskinan ini dikarenakan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan yang kurang merata.

Dari definisi kemiskinan di atas dapat di ketahui bahwa secara umum kemiskinan ialah kondisi seseorang atau kondisi keluarga yang berbeda dalam keadaan kekurangan sandang, pangan, papan, pendidikan dan ketidak layakan hidup menurut standar tertentu. Kemiskinan tidak hanya di definisikan berupa

materi saja tetapi juga banyak hal yang lebih kompleks sehingga di perlukan pemahaman yang luas dalam menyerap apa yang di definisikan sebagai kemiskinan. Di bawah ini ialah gambar lingkaran kemiskinan yang akan menjelaskan tentang bagaimana budaya dari kemiskinan yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya:

Gambar 1. 1 Lingkaran Kemiskinan



Berdasarkan gambar 1.1 lingkaran kemiskinan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa kemiskinan sangat berpengaruh dengan konsumsi rendah, pendapatan rendah, tabungan rendah, investasi rendah, produktivitas rendah hal tersebut yang menyebabkan individu atau kelompok dapat di katakan miskin.

Pada umumnya, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah daerah pedesaan, dengan mata pencaharian petani dengan kegiatan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional. Dengan demikian penyebab kemiskinan yang terjadi di pedesaan diantaranya sempitnya lahan pertanian yang mereka miliki atau tidak produktifitasnya lagi lahan pertanian yang di miliki. Rendahnya tingkat pendudukan sehingga berakibat pada rendahnya tingkat

pengetahuan dan produktivitas dalam mengelola usaha tani, tidak ada pekerjaan sampingan, besarnya jumlah tanggungan, pendapatan yang tidak menentu sebagai akibat usaha yang sangat tergantung dengan musim serta usia tanaman yang mereka miliki sudah cukup tua sehingga kurang produktif dalam menghasilkan produksi. Berikut adalah paparan terkait kondisi kemiskinan sebagai berikut:

1. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga ialah jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan dari rumah tangga tersebut, baik itu saudara kandung maupun saudara bukan kandung yang tinggal satu rumah tapi belum bekerja. Di negara yang berkembang seperti Indonesia, banyak yang beranggapan anak ialah investasi. Meskipun peningkatan penghasilan di gunakan untuk menambah jumlah anak, akan tetapi lebih baik peningkatan penghasilan di gunakan untuk menambah kualitas anak melalui pendidikan. Sehingga ada kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik dari pada orang tuanya di masa depan. Karena semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin besar pula kebutuhan yang di penuhi. Sehingga terjadilah penerimaan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga tersebut berada dalam keadaan tidak seimbang atau miskin hal ini di katakan oleh (Zartika, 2016). Jumlah tanggungan keluarga ini mempunyai hubungan yang erat sekali dengan masalah kemiskinan, dimana menurut (Zartika, 2016) bahwa besarnya jumlah tanggungan keluarga akan berpengaruh terhadap pendapatan di karenakan semakin banyaknya jumlah tanggungan keluarga atau jumlah anggota keluarga yang ikut makan secara tidak langsung akan memaksa

tenaga kerja tersebut untuk mencari tambahan pendapatan. Sehingga bisa di simpulkan bahwa orang yang memiliki jua tanggung keluarga yang cukup banyak maka jumlah penghasilan yang di butuhkan juga akan semakin besar. Apabila penghasilan yang di butuhkan tidak cukup maka akan terjadi kemiskinan.

2. Pendidikan dan Keterampilan Rendah

Menurut (Afrida, 2003) pendidikan merupakan persyaratan untuk mengikat martabat manusia. Melalui pendidikan warga masyarakat akan mendapatkan kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur kehidupan secara wajar. Perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi berarti membuka kesempatan ekonomis untuk mengupayakan perbaikan dan kemampuan dalam masyarakat.

Jadi pada dasarnya, sumber daya manusia yang berkualitas itu dapat menjadi tenaga kerja yang produktif. Hal ini di perkuat dengan adanya kenyataan bahwa tenaga kerja yang mempunyai pendidikan tinggi akan mampu bersaing untuk memperoleh pekerjaan yang layak sehingga di peroleh pendapatan yang layak pula. Sehingga, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi maka akan bisa meningkatkan kesempatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya serta pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Pendapatan rendah

Pendapatan atau pun penghasilan aialah bentuk balasan karya yang di peroleh sebagai imbalan atau balasan jasa sumbangan seseorang terhadap proses

produksi menurut teori Fisher dalam (Nopirin, 1996), tentang konsep yang berhubungan dengan pendapatan menyebutkan bahwa permintaan uang atau transaksi tergantung dari pendapatan, makin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula keinginan uang kas untuk bertransaksi.

Dari kaca mata tenaga kerja, upah di anggap sebagai sumber penghasilan pokok atau di sebut *human income*. Sebagai sumber pendapatan, tenaga kerja ingin agar mencukupi. Oleh karena itu, tenaga kerja mempunyai konsep tersendiri tentang seberapa tinggi upah yang sebaiknya. Dari berbagai faktor yang di jadikan pertimbangan mereka, ada dua buah yang penting dalam kaitannya dengan pembahasan sekarang ini. Pertama, tingkat upah perlu mencukupi kebutuhan, sedangkan yang kedua seseorang biasanya tidak hanya harus mencukupi kebutuhan bagi diri sendiri, melainkan juga untuk seluruh anggota keluarga yang intinya terdiri atas anak istri. Dalam konsep *taxtended family*, kepala rumah tangga sering kali menanggung kewajiban elementasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Namun, yang menjadi pertimbangan utama biasanya hanya keluarag inti (Arfida, 2002).

4. Kepemilikan sarana produksi yang masih sederhana dan etos kerja.

Kepemilikan sarana produksi yang masih sederhana menurut (Zartika, 2016) yaitu dalam melakukan kegiatan menggunakan alat alat yang masih sederhana dan alakadarnya.

Faktor lain menurut Kuncoro dalam (Zartika, 2016) penyebab kemiskinan di sebabkan oleh 3 faktor sebagai berikut :

1. Secara Mikro, kemiskinan muncul dengan adanya tidak meratanya kepemilikan SDM yang mengakibatkan pendapatan yang timpang. Penduduk miskin biasanya hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas yang di miliki rendah.
2. Kemiskinan di akibatkan dengan adanya perbedaan sumber daya manusia yang rendah yang mengakibatkan produktivitas rendah, upah rendah. Rendahnya sumber daya manusia ini di akibatkan oleh rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
3. Kemiskinan juga bisa di akibatkan oleh perbedaan akses dan modal. Untuk mengukur tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan kemiskinan absolut ialah dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok seperti : sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Kemudian karen biaya hidup di daerah kota dengan di daerah desa berbeda, maka oleh bang dunia di pakai sebagai ukuran dalam menetapkan garis kemiskinan ialah nilai US \$ 50 per kapita pertahun untuk tingkat pendapatan di desa, sedangkan US \$ 75 perkapita per tahun untuk tingkat kota pada keadaan tingkat harga tahun 1971 (Suyanto B. , 2014).

Menurut Sajogyo dalam (Hudaya, 2009) cara mengukur kemiskinan dengan pendekatan kemiskinan absolut ialah dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi (kalori dan Protein) dengan mengungkapkan masalah garis kemiskinan dan tingkat pendapatan petani. Ada tiga golongan orang miskin seperti golongan lapisan miskin yang mempunyai pendapatan perkapita pertahun dalam bentuk beras sebanyak lebih dari 360 kg

tetapi kurang dari 480 kg, golongan miskin sekali yang memiliki pendapatan perkapita pertahun dalam bentuk beras sebanyak 240-360 kg, dan lapisan paling miskin yang memiliki pendapatan perkapita pertahun dalam bentuk beras sebanyak kurang dari 240 kg.

Penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang di susun di Pemerintah pusat, mau pun pola baru hasil susunan Pemerintah Daerah, mungkin di sertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah (Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,2004). Otonomi daerah memungkinkan peningkatan penanggulangan kemiskinan karena menghadapi jarak spasial maupun temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri. Selain itu peluang tanggung jawab atas kegiatan tersebut berada di tangan pemerintahan kabupaten dan kota, serta pemerintah desa.

Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang di keluarkan dan di implementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi yang di capai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi malah terjadi ialah tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi (Rubiyanah, Minarsih, & Hasiholan, 2016).

Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah memperhatikan berbagai kelemahan, antara lain sebagai berikut:

1. Masih berorientasi kepada pertumbuhan marko tanpa memperhatikan aspek pemerataan.
2. Kebijakan yang bersifat sentralistik.
3. Lebih bersifat karikatif dari pada Transformatif.
4. Memposisikan masyarakat sebagai objek dari pada subjek.
5. Orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat dari pada produktivitas yang berkelanjutan.
6. Cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa permasalahan kemiskinan yang ada.

Karena beragamnya sifat tantangan yang ada, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik langsung mau pun tidak langsung (Bappenas, 2013).

Menurut (Tontowi, 2010) beberapa strategi telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi tingkat kemiskinan, meskipun kebijakan telah dilakukan tidak secara langsung mengurangi penyebab kemiskinan yang paling mendasar itu sendiri. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan tujuan untuk sebagai berikut :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi
2. Mempermudah lapisan social miskin untuk memperoleh akses dalam berbagai pelayanan social seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, air bersih, sinitasi.
3. Penyediaan kredit kredit untuk masyarakat lapisan bawah
4. Pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan

5. Pengembangan kelembagaan

Izzedin Bakhit (2001) berpendapat mengenai keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Agar program penanggulangan kemiskinan dapat memberikan hasil yang nyata, tak pelak adalah bagai mana mengempur akar kemiskinan hingga tuntas (*attacking the roots of poverty*) (Suyanto B. , 2014). Di berbagai daerah, tidak terkecuali Kabupaten Bantul, agar perkembangan jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan dan upaya penanggulangan kemiskinan dapat di percepat, maka yang di butuhkan kedepannya ialah model dan upaya upaya baru yang terfokus pada proses pemberdayaan, revitalisasi sistem setempat, pengakuan pada potensi lokal, peran aparatur pemerintahan baik di tingkat desa maupun kecamatan, peningkatan peran tim penanggulangan kemiskinan tingkat padukuhan, desa, dan kecamatan serta manajemen program yang benar benar solid di laksanakan di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Khususnya.

Adapun model implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menjadi acuan dalam penelitian ini ialah dengan model George Edwards dalam (Winamo, 2014) memberikan pendapat bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel di antaranya yaitu: komunikasi, sumber daya, kecendrungan kecendrungan, dan struktur birokrasi.

1.7. Definisi Konseptual

1. Efektifitas

Efektifitas dalam penelitian adalah mengetahui dan melihat keberhasilan BUMdes Panggung Lestari Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon dalam menanggulangi angka kemiskinan di desa tersebut

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dalam penelitian ini merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

3. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan implementasi yang langsung mengarah pada sasaran kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin dengan tujuan-tujuan tertentu.

1.8. Definisi Operasional

Tabel 1. 3 Tabel Indikator Penelitian

Tujuan	Variable	Indikator
Mengetahui Efektivitas Program BUMDes Badan Usaha Milik Desa dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten	Keberhasilan Program Badan Usaha Milik Desa	Visi dan Misi Program BUMDes dalam menanggulangi kemiskinan
	Produktifitas Program Badan Usaha Milik Desa	Melihat input dan output yang sesuai dengan visi dan misi tersebut

Efisiensi Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu program BUMDes dalam menanggulangi kemiskinan 2. Biaya dalam melaksanakan program tersebut
Kemampuan Beradaptasi Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan manajemen internal maupun eksternal dalam menanggulangi kemiskinan. 2. Pelatihan terhadap karyawan dalam pengelolaan program tersebut

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

1.9. Metode Penelitian

Dalam metode terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan seperti dengan cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk menciptakan data untuk tujuan dan kegunaan pada penelitian. Metode penelitian biasanya di gunakan untuk merancang pekerjaan yang akan di laksanakan sebelumnya, ketika, dan sesudah pengumpulan data.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi titik pengambilan data penelitian yaitu Kantor Kepala BUMDes Panggungharjo Kabupaten Bantul.

(Ghoni, 1997) Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara dari kuantifikasi (pengakuan). Penelitian kualitatif lebih berupaya untuk menciptakan teori baru dari pada menguji kebenaran sebuah teori. Dalam (Martono, 2011) manfaat analisis kualitatif, menemukan arti pemahaman, maksud peneliti kualitatif berupa untuk memahami bagaimana individu memaknai atau mendefinisikan gejala social atau objek yang berada di dalam atau diluar dirinya, sehingga dalam penelitian kualitatif tidak berupaya mencari hubungan antara gejala social yang satu dengan yang lain.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil data penelitian dengan mencermati tulisan-tulisan mengenai bagaimana peran pemerintahan Desa Panggungharjo dalam menanggulangi kemiskinan lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta memahami percakapan informasi, mencermati dan membandingkan hasil wawancara satu informan dengan informan lainnya untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang di jatuhkan oleh peneliti eksplorasi data dominan memakai metode wawancara dengan orang-orang terdekat objek penelitian untuk mengeksplorasi

pengalaman, pendapat serta pandangan terhadap objek penelitian yang meliputi pengalaman informasi selama menjadi aparatur Pemerintahan Desa Panggunharjo. Jadi dapat di simpulkan, penelitian dengan metode tersebut dapat menghasilkan satu data deskriptif mengenai bagaimana peran Pemerintahan Desa Panggunharjo dalam mengatasi kemiskinan.

2. Teknik Pengumpulan data

(Sugiono, 2015) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai sumber data penelitian dengan menelaah dan menganalisis data-data sekunder dari laporan penelitian, jurnal, buku, koran, website, mau pun berbagai dokumentasi lainnya yang berhubungan tentang peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

b. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pihak pewawancara (interviewer) yang memberikan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diberikan (Moleong, 2017). Wawancara dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang sudah

ditetapkan menjadi informan sehingga bisa di jadikan bahan acuan dalam penulisan. Informan yang di maksud dalam penelitian ini berasal dari aparatur desa, karena berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan

Tabel 1. 4 Sumber Wawancara

No	Sumber Informasi
1	Pimpinan Pengelola BUMDes
2	Kepala Desa
3	Beberapa Staff BUMDes
4	Tokoh Masyarakat

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi dalam hal ini bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun karya karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi ini di jadikan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016) . Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi gambaran umum wilayah Desa Panggunharjo, Struktur organisasi kantor desa, laporan akuntabilitas instansi pemerintah desa, jumlah pegawai dari kantor pemerintah desa.

3. Sumber Data

Ada dua jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang di dapat melalui kegiatan observasi terhadap lokasi penelitian, kegiatan wawancara mendalam dan

beberapa dokumentasi yang berkaitan langsung dengan penelitian. Ada pun data primer yang di maksud dalam penelitian ini ialah pendapat para informan yang di anggap ada relevansi dengan tema penelitian ini antara lain mewawancarai Kepala seksi kemasyarakatan dan aparatur Desa Panggungharjo.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung yang akan digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari buku buku, jurnal, arsip, peraturan perundang-undangan, media massa, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan peran aparatur pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Gambaran umum wilayah Desa Panggungharjo
- 2) Profil Kantor Desa Panggungharjo. Profil kantor desa yang di maksud untuk mengetahui gambaran dan kinerja dari aparatur pemerintah desa dalam mengatasi kemiskinan
- 3) Data Warga Miskin (GAKIN) dan Rentan Miskin
- 4) RPJMDes Desa Panggungharjo

3. AnalisisData

Analisis data yang di laksanakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif di peroleh dari data reduction, dan display, dan data conclusion drawing / verification Sirmayanti dalam (Sugiyono, 2016) . Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan catatan tertulis dilapangan.. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian ini di kerjakan.

Analisis data kualitatif ini di maksud untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran aparetur pemerintahan Desa Panggunharjo dalam mengatasi kemiskinan pada tahun 2017-2018.

Setelah menganalisi data kemudian di lanjutkan dengan keabsahan data kualitatif yaitu dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini ialah dengan membandingkan informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain, misal nya pada pegawai aparatur desa satu dengan pegawai aparatur desa yang lain.